

Fluktuasi Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina

Hafid Adim Pradana¹

Abstract

Foreign policies of Israel to Palestine generally has purpose to take over Palestine region. Since Palestine had declared in 1988, there is fluctuation about Foreign politics of Israel toward Palestine. It started in Yitzhak Shamir regime which there is offered negotiation with Palestine, and it have been continued by Yitzhak Rabin who was killed finally after first and second Oslo agreement. In Netanyahu era, there is increased agresiveness about foreign policies of Israel toward Palestine that can be seen from many violences to take over Palestine region. After Netanyahu's regime, foreign policies of Israel toward Palestine was falls down. It was indicated from second Camp David agreement in Ehud Barak's regime. After that, Ariel Aharon had became a prime minister of Israel. In that era, there is increased agresiveness again which was indicated from many violences to civilian people of Palestine. After 3 years, Sharon gave some of Israel region to Palestine. It shows that foreign policies of Israel toward Palestine was falls down again. After Sharon's regime, agresiveness foreign policies of Israel toward Palestine increase again. It was show from Gaza invansion in Ehud Olmert era, isolation politic, many efforts to anexation Palestine region, and many violences to civilian people of Palestine in Netanyahu's regime after general election of Israel in 2009.

Key words : Foreign Policy, Israel-Palestine, Fluctuation, Agresiveness, Annexation

Abstraksi

Politik luar negeri Israel terhadap Palestina secara umum memiliki tujuan akhir untuk menganeksasi wilayah Palestina. Sejak Palestina secara resmi dideklarasikan pada tahun 1988, Politik luar negeri Israel terhadap Palestina senantiasa mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut diawali oleh rezim Yitzhak Shamir yang ditandai oleh adanya pengusulan negosiasi dengan Palestina dan kemudian dilanjutkan oleh Yitzhak Rabin yang pada akhirnya terbunuh pasca penandatanganan perjanjian Oslo I dan II. Pada masa Netanyahu terjadi peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina berupa berbagai tindakan kekerasan dalam upaya menganeksasi wilayah Palestina. Pasca rezim Netanyahu, agresifitas politik luar negeri Israel menurun drastis yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Camp David II pada masa kepemimpinan Ehud Barak. Pada rezim Ariel Sharon, agresifitas Israel kembali meningkat dengan masifnya tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Pasca tiga tahun pemerintahannya, Sharon mengambil kebijakan berupa penyerahan sebagian wilayah Israel terhadap Palestina yang menandai turunnya agresifitas Israel. Pasca jatuhnya Sharon, agresifitas Israel kembali meningkat yang ditandai dengan adanya invasi ke Gaza pada masa Ehud Olmert dan adanya politik isolasi, berbagai upaya aneksasi, dan masifnya tindak kekerasan terhadap warga sipil Palestina pada rezim kepemimpinan Benjamin Netanyahu pasca pemilu Israel 2009.

Kata Kunci : Politik Luar Negeri, Israel-Palestina, Fluktuasi, Agresifitas, Aneksasi

¹ Alumnus Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), bisa dihubungi via email: hafidadimpradana@yahoo.co.id

Pendahuluan

Timur Tengah adalah wilayah yang tidak pernah lepas dari adanya konflik yang senantiasa mewarnai dinamika di kawasan tersebut. Berbagai macam konflik senantiasa terjadi sejak zaman sebelum masehi hingga saat ini. Salah satu konflik yang hingga saat ini terus terjadi ialah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik tersebut secara historis dilandasi oleh pengesahan deklarasi Balfour pada 1917. Deklarasi tersebut secara umum berisi tentang yang penyetujuan pembentukan sebuah Negara Yahudi di Palestina oleh Arthur James Balfour, yang pada saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri Inggris. Implementasi deklarasi tersebut akhirnya terealisasi pada 1948, dimana Israel secara resmi menyatakan kemerdekaannya.

Konflik antara Israel, negara-negara Arab dan Palestina pada mulanya diawali oleh adanya deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948, yang kemudian direspon negara-negara Arab dengan serangannya ke Israel. Perseteruan negara-negara Arab dengan Israel masih terus berlanjut dengan adanya perang pada 1967. Dimana pada perang tersebut pihak Israel selalu berhasil memukul negara-negara Arab. Kegagalan negara-negara Arab pada perang 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia. Sejak itulah konflik antara Israel dan Palestina semakin meruncing. Hingga saat ini konflik antara Israel dan Palestina belum juga menemukan resolusi yang pas bagi kedua belah pihak.

Sedikitnya terdapat beberapa faktor yang membuat perdamaian antara kedua pihak, sulit untuk diwujudkan.² Diantaranya ialah, *pertama*, beberapa kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak hingga saat ini belum juga dapat menemukan suatu resolusi yang *sustainable*, terutama dalam implementasi dari resolusi tersebut. Dari banyak perjanjian maupun konferensi perdamaian dari Oslo hingga Annapolis, sulit untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mewujudkan perdamaian. Walaupun kesepakatan itu tercapai, implementasi di lapangan tidaklah demikian. Seringkali masih terjadi beberapa kali konflik dan baku tembak antara warga sipil maupun militer bagi kedua belah pihak.

Faktor *kedua*, tidak adanya mediator konflik yang dengan sungguh bersedia untuk menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas. Dalam hal ini Amerika Serikat yang telah beberapa kali berperan sebagai mediator dapat dikatakan kurang sungguh dalam berperan untuk menengahi konflik yang melibatkan Israel dan Palestina. Dan yang *ketiga* ialah, berkuasanya Partai Likud di pemerintahan Israel. Dalam sejarah pencapaian resolusi konflik kedua belah pihak, jika Israel dikuasai oleh partai Likud, maka sangatlah sulit untuk mencapai sebuah perdamaian, karena partai Likud sendiri adalah partai yang terkenal dengan penolakannya terhadap berdirinya negara Palestina.³

Disamping itu terhambatnya perdamaian antara Israel dan Palestina juga berkaitan erat dengan faktor pemimpin di masing-masing pihak, termasuk juga di pihak Israel. Pemimpin yang juga bertugas sebagai pengambil kebijakan mempunyai peranan penting dalam menentukan arah politik luar negeri negara yang dipimpinnya. Dalam artian politik luar negeri atau tindakan suatu negara terhadap negara lain merupakan gambaran dari visi pemimpinnya. Di Israel faktor individu terpilih yang berhasil mengisi kursi posisi Perdana Menteri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi arah politik luar negeri negara tersebut, khususnya politik luar negeri terhadap Palestina. Dengan kata lain, agresif atau tidaknya sikap atau politik luar negeri Israel terhadap Palestina sangat bergantung pada pengambil kebijakan, dalam hal ini Perdana Menteri yang sedang berkuasa di negara

² Reza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta: Mizan, 2007, hlm. 318-319

³ *Ibid*, hlm. 318-319

tersebut. Setidaknya hal tersebut dapat terlihat dalam satu dekade kebelakang, khususnya pasca perjanjian Camp David tahun 2000. Dengan demikian individu pengambil kebijakan di Israel mempunyai andil dalam terjadinya fluktuasi agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina.

Politik Luar Negeri Israel terhadap Palestina

Jika kita berbicara tentang politik luar negeri, secara umum tidak ada satu pengertian tunggal dan tepat dalam perumusan definisi politik luar negeri. Salah satu cara mudah untuk memahami konsep politik luar negeri adalah melakukan pemisahan unsur politik dan luar negeri. Politik adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman dalam bertindak, sedangkan konsep luar negeri berkaitan dengan kedaulatan dan "wilayah" suatu negara terhadap negara lain.⁴ Rosenau mengartikan politik luar negeri sebagai upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternal.⁵ Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri AS mengutarakan bahwa politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik domestik.⁶

Variatifnya definisi mengenai politik luar negeri, membuat studi mengenai politik luar negeri menjadi kompleks. Seperti halnya Kissinger yang memahami politik luar negeri sebagai perpanjangan politik domestic, para teoritis lain juga mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dalam mendefinisikan konsep politik luar negeri. Beberapa diantaranya seperti Lorenz dan Laswell⁷, yang memakai pendekatan individu dalam mendefinisikan politik luar negeri. Menurut Laswell, politik luar negeri adalah hasil dari upaya kepribadian aktor politik dalam memproyeksikan dirinya pada suatu objek publik dan kemudian merasionalisasikan tindakan itu dengan dalih kepentingan publik. Argumen Laswell tersebut tentunya didasarkan atas pengamatan dan juga pengalaman historisnya. Dengan demikian faktor individu merupakan salah satu pendekatan yang dapat menjelaskan konsep politik luar negeri.

Secara umum politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional.⁸ Wujud dari politik luar negeri ini bisa berupa hubungan diplomatik, pengeluaran doktrin, pembuatan aliansi, penancangan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.⁹

Naomi Chazan menggambarkan politik luar negeri Israel:

" ...directly reflects shifting ideological concerns, perceptions, and priorities. Zionist

⁴ Gracia Paramitha, "Seluk Beluk Politik Luar Negeri", 2011, <http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html>, diakses pada 2 Maret 2011, 12.20 WIB.

⁵ James N. Rosenau, "Introduction: New Directions and Recurrent Questions in the Comparative Study of Foreign Policy", in Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr., James N. Rosenau, (eds.), *New Directions in the Study of Foreign Policy*, Boston: Allen & Unwin, 1987, hlm. 1-2, dalam Gracia Paramitha, "Seluk Beluk Politik Luar Negeri", 2011, <http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html>, diakses pada 2 Maret 2011, pukul 12.23 WIB

⁶ *Ibid.*

⁷ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 12

⁸ Abubakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Bandung: Nuansa, 2011, hlm. 13.

⁹ K.J. Holsti, *International Politics: a Framework for Analysis*. (4th. Ed. Ed). London: Prentice Hall, 1983, hlm. 97 dalam *Ibid.* Seperti halnya Holsti, definisi yang luas mengenai politik luar negeri juga diberikan oleh Christopher Hill yang mengatakan politik luar negeri sebagai jumlah hubungan luar resmi yang dilakukan oleh actor independen (biasanya negara) dalam hubungan internasional. Lihat Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2003, hlm. 3 dalam *Ibid.*

*ideology is the linchpin of the definition of israeli national objectives and the fundamental prism of israel's interaction in the global arena.*¹⁰

Mengacu pada definisi diatas, secara umum politik luar negeri Israel dijalankan berdasarkan kepentingan dalam negerinya. Maka, segala kebijakan luar negerinya sedapat mungkin diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dalam negeri. Hal tersebut mengacu pada sejarah berdirinya negara Israel yang merasa keamanan dalam negerinya merupakan salah satu fungsi diplomatik internasionalnya.¹¹ Sejak awal berdirinya negara Israel, sedikitnya terdapat tiga fase politik luar negeri Israel.

Pada fase *pertama*, Israel masih disibukkan dengan awal berdirinya negara. Pada masa tersebut, Israel melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional. Fase *kedua* politik luar negeri Israel lebih menitikberatkan pada kepentingan domestic. Pembangunan dalam negeri tergantung pada keamanan daerah perbatasan. Untuk melaksanakan tujuannya itu, Israel memberikan pembekalan kepada para diplomat asingnya untuk dapat mendekati negara-negara Arab tetangganya. Israel memakai istilah "*carrot and stick*" dalam berhubungan dengan negara-negara Arab tetangganya. Politik *carrot* dijalankan kepada negara yang mau menagadakan negosiasi dan kerjasama dengan Israel. Sedangkan dengan politik *stick*, Israel ingin menunjukkan superioritasnya dalam bidang militer. Untuk menunjukkan kekuatannya ini, Israel bergantung pada bantuan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Bantuan Amerika Serikat mengalir dengan deras ke Israel untuk memperkuat posisinya, seperti yang terlihat pada perang Arab-Israel tahun 1956 dan 1967.¹²

Pada fase *ketiga*, hubungan Israel dengan Amerika Serikat agak "merenggang", atau dapat dikatakan mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya embargo minyak Timur Tengah yang dilakukan oleh negara-negara Arab pada awal 1970-an yang membuat Amerika Serikat mulai menyadari akan kebutuhannya terhadap minyak dan mulai mendekati Negara-negara Arab. Kondisi ini membuat hubungan Israel dan Amerika Serikat menjadi renggang, mengingat hubungan buruk Israel dengan Negara-negara Arab pada masa itu yang terlihat dari adanya serangkaian perang Arab-Israel. Melihat kenyataan ini, Israel menerapkan politik luar negerinya secara lebih pragmatis.¹³

Pasca tiga fase awal tersebut, politik luar negeri Israel diwarnai oleh beragamnya sikap Israel terhadap negara-negara Arab tetangganya, seperti penandatanganan perjanjian Camp David dengan Mesir pada 1978, serta invasi ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun yang sama. Pada decade selanjutnya politik luar negeri Israel identik dengan agresifitas militer. Hal tersebut terlihat dari adanya penyerangan reactor nuklir Irak pada 1981, invasi ke Lebanon pada 1982, serta pengeboman markas besar PLO di Tunisia pada 1985.

Pada dekade 1990-an, politik luar negeri Israel lebih banyak berorientasi terhadap penyikapan terhadap permasalahan wilayah Palestina. Hal ini terlihat dari adanya penandatanganan perjanjian Oslo I¹⁴ dan II¹⁵ pada 1993 dan 1995, dan perjanjian Wye

¹⁰ Naomi Chazan, Judith Kipper, and Harold H. Saunders (ed.), *The Middle East in Global Perspective*, Colorado: United State of America by Westview Press, 1991, hlm. 104

¹¹ Inu Kencana, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bandung:Refika Aditama, 2005, hlm. 165

¹² *Ibid*, hlm. 157.

¹³ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁴ Perjanjian Oslo I tahun 1993 secara umum berisi tentang komitmen untuk saling mengakui antara Israel dengan Palestina, serta adanya pemerintahan sendiri yang terbatas bagi Palestina. Lihat Trias Kuncahyono, *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008, hal. 275-279

¹⁵ Perjanjian Oslo II menetapkan tiga bentuk pengawasan Tepi Barat (Area A: Pengawasan langsung oleh Palestina, Area B: Pengawasan sipil Palestina dan pengawasan keamanan Israel, Area C:

River pada 1998. Dalam decade tersebut, juga terjadi fluktuasi politik luar negeri Israel terhadap Palestina, yang terlihat dari adanya upaya aneksasi dalam pembangunan pemukiman Har Homa yang terletak antara Jerusalem dan Bethlehem pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu tahun 1996. Memasuki millennium baru, politik luar negeri Israel masih berfokus pada penyikapan terhadap Palestina. Hal tersebut terlihat dari adanya fluktuasi kebijakan luar negeri terhadap Palestina dalam beberapa periode pemerintahan. Selain itu kebijakan penyerangan terhadap Lebanon¹⁶ pada masa Ehud Olmert dan juga invasi Gaza pada periode yang sama, menunjukkan upaya Israel dalam mempertahankan keamanan nasionalnya.

Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina

Politik luar negeri secara praktis juga dapat dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan suatu negara terhadap negara lain. Suatu negara dapat bertindak agresif ataupun acuh terhadap negara lain. Agresifitas sendiri adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah permusuhan atau tindakan melukai pihak lain baik dengan tindakan kekerasan langsung maupun tidak langsung. Tindakan agresi merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum agresifitas dapat dilihat dari adanya indikasi berupa meningkatnya intensitas sikap atau tindakan yang merugikan pihak lain guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷

Agresifitas suatu negara terhadap negara lain dapat dilihat dari beberapa indikator. Dalam kaitannya dengan judul diatas, maka indikator agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina

Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina	
Indikator	Keterangan
Akselerasi serangan terhadap Hamas	Berbagai serangan terhadap para pejuang Hamas yang dilakukan oleh militer Israel. Sesuai dengan definisi dari agresifitas, yang merupakan tindakan melukai pihak lain baik dengan tindakan kekerasan langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan tertentu, maka akselerasi serangan Israel terhadap Hamas merupakan wujud dari tindakan Israel untuk "melukai" Hamas guna mencapai tujuannya, yaitu menjaga keamanan nasionalnya.
Meningkatnya pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur,	Kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur pada mulanya ditetapkan pada masa pemerintahan Ehud Olmert. Pada masa kepemimpinan Benjamin Netanyahu,

Pengawasan Israel). Disarikan dari Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*, Jakarta: Mizan, 2007, hlm. 463

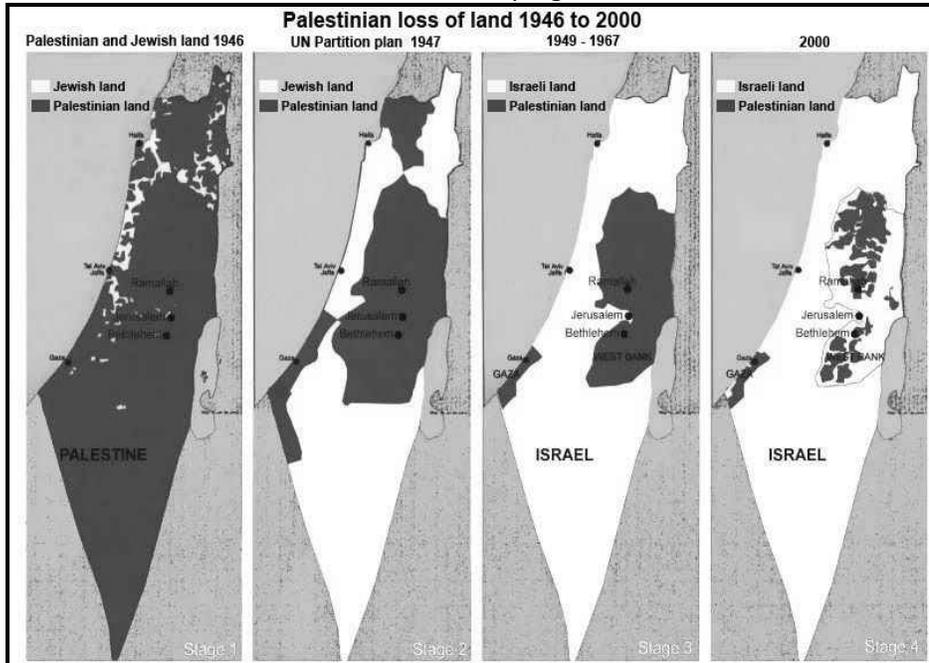
¹⁶ Invasi Israel ke Lebanon dimulai pada Juli 2006, yang disebabkan oleh adanya penangkapan 2 tentara Israel oleh milisi Hizbullah. Lihat ip.sg.or.id/2006/07/14/rakyat-sipil-menjadi-korban-serangan-israel/, diakses pada 23 Juli 2011, pukul 11.08 WIB.

¹⁷ <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01d1/0a617f0b.dir/doc.pdf>, diakses pada 4 Mei 2011, pukul 22.10 WIB.

	<p>intensitas pembangunan pemukiman Yahudi tersebut semakin ditingkatkan, meskipun dalam periode November 2009 hingga Oktober 2010, Netanyahu telah menandatangani moratorium penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur. Agresifitas tindakan Israel terlihat dari kengototan Negara tersebut untuk terus membangun pemukiman Yahudi di tengah waktu pemberlakuan persetujuan moratorium yang juga disepakati oleh Israel. Tindakan agresif yang dilakukan oleh Israel tersebut bertujuan untuk menguasai wilayah Jerusalem secara penuh.</p>
<p>Pengetatan politik isolasi yang diterapkan oleh Israel di jalur Gaza</p>	<p>Blokade jalur Gaza bermula dari kebijakan Israel pada masa Olmert yang melarang adanya perpindahan warga Palestina di jalur Gaza keluar wilayah tersebut. Pada masa Netanyahu, masuknya barang ke jalur Gaza semakin diperketat dengan dilarang masuknya berbagai bantuan dari pihak asing terhadap warga Palestina di jalur Gaza, dimana hal tersebut kemudian berujung pada terjadinya tragedy Mavi Marmara pada Juni 2010. Pengetatan politik isolasi tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan agresif Israel yang bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan Hamas yang berkuasa di wilayah jalur Gaza.</p>

Politik luar negeri Israel terhadap Palestina secara umum dapat dikatakan bertujuan akhir untuk menganeksasi wilayah Palestina. Hal ini terlihat jelas dari berbagai upaya aneksasi yang terus dilakukan oleh Israel. Upaya aneksasi wilayah Palestina telah dilakukan oleh kaum Yahudi Zionis jauh sebelum berdirinya negara Israel. Aneksasi tanah Palestina tersebut bertujuan untuk menguasai secara penuh wilayah Palestina, yang mana hal itu dilandasi oleh ideologi Zionisme yang menjadi keyakinan bangsa Yahudi Zionis, dan membentuk persepsi para pemimpin Israel selanjutnya.

Gambar 1. Tanah Palestina yang dianeksasi oleh Israel¹⁸



Dilihat dari sisi historis terdapat empat tahapan yang menunjukkan upaya aneksasi terhadap tanah Palestina. Gambar 1.1 diatas memperlihatkan pesatnya perluasan wilayah Israel terhadap Palestina sebagai hasil dari upaya aneksasi yang telah diusahakan sejak 1946. Aneksasi merupakan suatu hal yang menjadi tujuan bersama kaum Yahudi di Israel. Hanya saja, cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, tergantung rezim yang berkuasa di Negara Yahudi tersebut. Dalam hal ini individu yang menduduki kursi Perdana Menteri sangat menentukan Politik Luar Negeri Israel terhadap Palestina.

Fluktuasi Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina

Sejak Palestina secara resmi dideklarasikan pada tahun 1988 pada pertemuan Dewan Nasional Palestina di Aljazair,¹⁹ Politik luar negeri Israel terhadap Palestina senantiasa mengalami fluktuasi. Salah satu factor naik turunnya politik luar negeri Israel terhadap Palestina ialah rezim yang berkuasa di Israel. Faktor terpilihnya individu yang memenangi posisi Perdana Menteri dalam pemilihan umum, sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri yang diterapkan terhadap Palestina. Dalam sub-bahasan berikut akan dijelaskan gambaran umum politik luar negeri Israel terhadap Palestina dalam periode kepemimpinan Perdana Menteri Israel sejak tahun 1988 hingga periode kedua kepemimpinan Benjamin Netanyahu tahun 2009, yang menunjukkan adanya fluktuasi politik luar negeri Israel terhadap Palestina.

Masa Pemerintahan Yitzhak Samir (1986-1992)

Yitzhak Shamir terpilih kembali menjadi Perdana Menteri pada pemilihan umum 1986, setelah sebelumnya juga menduduki posisi tersebut pada periode 1983-1984. Pada masa itu politik luar negeri Israel terhadap Palestina, diwarnai oleh adanya pengusulan negosiasi dengan Palestina yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Yitzhak Shamir.²⁰ Meski berasal dari partai Likud, Shamir yang merupakan penganut ajaran Zionisme, tidak

¹⁸ <http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://sahabatalaqsha.com/nws/wpcontent/uploads/2010/05/Tanah-Palestina-yang-dicaplok-Israel-dari-tahun-ke-tahun.-Warna-hijau-menunjukkan-wilayahPalestina.-buchanan.org>, diakses pada 8 Mei 2011, pukul 19.39 WIB.

¹⁹ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, hlm. 460

²⁰ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, hal. 461

dapat menjalankan politik luar negerinya terhadap Palestina secara leluasa.

Ketidakmampuan Shamir dalam menetapkan politik luar negerinya terhadap Palestina, disebabkan oleh terpecahnya Parlemen (*Knesset*) yang berujung pada adanya mosi ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Shamir pada 1990. Pada tahun yang sama, Parlemen Israel belum mengadakan pemilihan umum, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Shamir untuk membentuk pemerintahan sayap kanan yang dipimpin oleh partai Likud. Parlemen Israel (*Knesset*) baru mengadakan kembali pemilihan umum pada 1992.

Masa Pemerintahan Yitzhak Rabin/Shimon Peres (1992-1996)

Parlemen Israel kembali mengadakan pemilihan umum pada 1992. Pemilihan umum tersebut berhasil dimenangi oleh Yitzhak Rabin dengan sokongan partai Buruh. Pada masa pemerintahan Rabin, politik luar negeri Israel terhadap Palestina dapat dikatakan cenderung melunak. Hal tersebut ditandai oleh adanya Perjanjian Oslo I pada 1993, dan Perjanjian Oslo II pada 1995, yang menetapkan tiga bentuk pengawasan di Tepi Barat. Tahun 1995, Yitzhak Rabin terbunuh di Tel Aviv oleh Yigal Amir, seorang Yahudi yang tidak sepakat dengan penandatanganan perjanjian Oslo. Terbunuhnya Yitzhak Rabin secara langsung mengakhiri pemerintahannya. Selanjutnya kursi Perdana Menteri Israel sementara diduduki oleh Shimon Peres, sebelum Parlemen (*Knesset*) mengadakan pemilihan umum pada 1996.²¹

Adanya upaya penciptaan perdamaian dengan Palestina oleh Israel, melalui penandatanganan perjanjian Oslo, menunjukkan adanya sikap lunak Israel terhadap Palestina. Penyikapan tersebut merupakan tindak lanjut dari masa pemerintahan sebelumnya, dimana pada masa Shamir sempat terdapat adanya usulan negosiasi dengan Palestina, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Oslo pada rezim Yitzhak Rabin.

Masa Pemerintahan Benjamin Netanyahu (1996-1999)

Tahun 1996, Parlemen Israel kembali mengadakan pemilihan umum yang berhasil dimenangi oleh Benjamin Netanyahu. Terpilihnya Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri pada pemilihan umum 1996 di bawah dukungan partai Likud membuat politik luar negeri terhadap Palestina, dapat dikatakan merupakan politik aneksasi atau politik perluasan wilayah. Israel pada saat itu bertindak agresif dalam mengupayakan perluasan wilayah mereka ke wilayah Palestina. Hal tersebut tentunya dapat dikatakan sebagai suatu perubahan drastic politik luar negeri Israel terhadap Palestina, mengingat pada periode kepemimpinan Yitzhak Rabin, Israel senantiasa menyetujui tawaran penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Palestina.

Agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina terlihat dari adanya dukungan pemerintah Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap keberadaan 400 warga Yahudi di Hebron di tengah puluhan ribu warga Palestina. Dimana kehadiran warga Yahudi di Hebron masih dianggap sebagai suatu hal yang kontroversial.²² Kebijakan tersebut secara langsung mengindikasikan adanya upaya aneksasi terhadap wilayah Palestina yang terletak di selatan Tepi Barat.

Kerasnya kebijakan luar negeri Israel pada masa Benjamin Netanyahu juga terlihat dari sempat adanya kemacetan dalam proses penandatanganan perjanjian *Wye River*.²³ Dimana, bersama kelompok ultranasionalis yang bernaung dibawah partai pendukungnya, Benjamin Netanyahu sempat menolak menandatangani perjanjian tersebut dengan

²¹ *Ibid.*

²² Musthafa Abd. Rahman, *Dilema Israel....*

²³ Perjanjian Wye River pada 1998 secara umum berisi tentang kesepakatan penarikan pasukan Israel di 13% wilayah Tepi Barat sungai Jordan. Lihat http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=24766&catid=26&Itemid=88

mengacu pada prinsip “tiga tidak” yaitu: tidak akan ada negara Palestina merdeka; tidak akan ada perundingan mengenai status kota Jerusalem; dan tidak akan mengembalikan Dataran Tinggi Golan kepada Suriah serta tidak mengizinkan larangan pengadaan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.²⁴

Sikap tersebut secara jelas memperlihatkan adanya peningkatan agresifitas kebijakan luar negeri Israel pada masa tersebut dibandingkan masa sebelumnya, meskipun pada akhirnya Netanyahu menandatangani perjanjian *Wye River* karena adanya tekanan dari dunia internasional. Penandatanganan itu pula yang kemudian menjadi penyebab parlemen (*Knesset*) mengadakan pemilihan umum yang berujung pada kekalahan Benjamin Netanyahu.

Masa Pemerintahan Ehud Barak (1999-2001)

Pemilihan Umum pada tahun 1999 berhasil memenangkan Ehud Barak sebagai Perdana Menteri, mengalahkan calon *incumbent* Benjamin Netanyahu. Di bawah kepemimpinan Ehud Barak yang berangkat dari partai Buruh, sebenarnya terdapat harapan akan terciptanya proses perdamaian kembali dengan Palestina, setelah sebelumnya sempat tersendat selama tiga tahun pada masa kepemimpinan Benjamin Netanyahu.

Masa pemerintahan Ehud Barak sempat diwarnai oleh adanya perjanjian Camp David pada tahun 2000.²⁵ Perjanjian tersebut pada akhirnya tidak menemui suatu titik terang yang dikarenakan ketidaktiadaan kesepakatan antara Ehud Barak dan Yasser Arafat sebagai pemimpin Palestina. Selain faktor di atas, krisis politik internal yang begitu mendominasi pada masa kepemimpinannya juga menghambat upaya penciptaan perdamaian dengan Palestina yang telah direncanakan sebelumnya.²⁶ Adanya penandatanganan perjanjian Camp David tahun 2000 menunjukkan adanya penurunan agresifitas politik luar negeri Israel pada masa Ehud Barak. Selain itu, penurunan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina juga terlihat dari tidak adanya ketidakjelasan sikap Israel terkait kebijakan luar negerinya terhadap Palestina pasca penandatanganan perjanjian Camp David tahun 2000, yang disebabkan oleh adanya krisis politik internal di *Knesset*.

Masa Pemerintahan Ariel Sharon (2001-2005)

Hanya dua tahun berselang, atau lebih tepatnya pada tahun 2001, kursi perdana menteri kembali jatuh dalam genggamannya partai Likud. Kali ini Ariel Sharon berhasil menduduki kursi tersebut menggantikan Ehud Barak. Di bawah kepemimpinan Sharon, politik luar negeri Israel terhadap Palestina dapat dikatakan merupakan politik luar negeri kekerasan. Dalam artian politik luar negeri Israel terhadap Palestina pada masa itu cenderung menggunakan kekerasan, dengan dalih sebagai bentuk eksistensi Israel. Hal tersebut tampak jelas dari adanya salah satu kebijakan Ariel Sharon yang menyetujui pengejaran dan pembasmian aktivis pejuang Palestina.²⁷

Kerasnya kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina pada awal masa pemerintahan Ariel Sharon terlihat dari adanya instruksi untuk melakukan pembalasan dan penghancuran infrastruktur Palestina, serta pembunuhan terhadap pihak yang dituding

²⁴ Dedy Jayadiputra, *Politik luar negeri PM. Benjamin Netanyahu terhadap perjanjian Wye River (1996-1999)*, Kumpulan tesis Universitas Indonesia, Jakarta, Dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=92736&lokasi=lokal>, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 14.56 WIB.

²⁵ Perjanjian tersebut pada akhirnya berujung pada tidak adanya kesepakatan antara pihak Israel dan juga Palestina. Faktor yang ditengarai menghambat kesepakatan dalam pertemuan yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton tersebut ialah kebuntuan penyelesaian dalam permasalahan Al-Quds dan pengungsi Palestina oleh pihak Israel. Lihat http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=24766&catid=26&Itemid=88

²⁶ Musthafa Abd. Rahman, *Dilema Israel...*

²⁷ *Ibid*, hlm. 167

sebagai teroris dan juga masyarakat sipil Palestina pada bulan Desember tahun 2001. Dimana kebijakan tersebut muncul sebagai respon atas adanya konflik verbal dan militer yang terjadi antara Israel dan Pelestina dan diikuti dengan beberapa serangan dari Palestina kepada masyarakat sipil Israel melalui gerakan intifada kedua. Dalam kurun waktu awal pemerintahan Ariel Sharon tersebut, terlihat adanya peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina, dibandingkan masa pemerintahan Ehud Barak.

Akan tetapi memasuki medio pemerintahannya, atau tepatnya pada tahun 2004, Ariel Sharon mengajukan kebijakan *Unilateral Disengagement Plan*²⁸ kepada Palestina, atau disebut juga sebagai *Gaza Expulsion Plan* atau *Hitnatkut* yang kemudian tetap direalisasikan oleh parlemen Israel (*Knesset*) pada tahun 2005.²⁹ Kebijakan tersebut secara umum berisi catatan yang menyatakan bahwa 21 pemukiman Israel yang berada di wilayah jalur Gaza yang terdiri dari wilayah Bedolah, Bnei Atzmon (Atzmona), Dugit, Elei Sinai, Gadid, Gan Or, Ganei Tal, Katif, Kfar DaromKfar Yam, Kerem Atzmona, Morag, Neveh Dekalim, Netzarim, Netzer Hazani, Nisanit, Pe'at Sade, Rafiah Yam, SlavShirat Hayam dan Tel Katifa, serta empat pemukiman Israel di tepi barat (*West Bank*) yang terdiri dari wilayah Kadim, Ganim, Homesh, Sa-Nur ditarik dan dihancurkan, termasuk kehadiran sipil.

Adanya kebijakan *The Unilateral Disengagement Plan* menunjukkan penurunan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina dibandingkan pada tahun 2001-2003. Kebijakan itu sendiri mendapatkan banyak kritik. Di Israel sendiri, Ariel Sharon dianggap sebagai penghianat oleh pendukungnya, kebijakan ini juga tidak mengubah keadaan Israel secara ekonomi. Dari sudut pandang Palestina sendiri, kebijakan *The Unilateral Disengagement Plan* menimbulkan tanda tanya besar karena Ariel Sharon yang notabene keras dalam bertindak tiba-tiba membuat kebijakan seperti itu. Muncul dugaan bahwa berubahnya sikap Ariel Sharon disebabkan oleh perspektifnya yang memandang bahwa Israel tidak akan hidup tenang dan sejahtera dengan memelihara terus menerus permusuhannya dengan bangsa Palestina dan dunia Arab.³⁰

Dari dalam negeri Israel, kebijakan tersebut membuat beberapa masyarakat melakukan blokade sebagai bentuk protes publik Israel di lebih dari 40 persimpangan jalan di negara tersebut. Mereka melakukan hal itu dengan beberapa alasan, salah satu diantaranya yaitu pernyataan Tuhan bahwa tidak ada yang boleh melepaskan wilayah yang Tuhan berikan atas Israel. Sedangkan dari sisi militer hal itu dianggap bahaya karena posisi roket Hamas semakin dekat dengan Israel. Kelompok pendemo tersebut selanjutnya mengelompokkan diri mereka dalam gerakan pita oranye yang menentang kebijakan *The Unilateral Disengagement Plan*.³¹

Kebijakan tersebut secara langsung membuat Ariel Sharon terdesak dari dalam negeri karena dianggap kontroversial, karena kebijakan tersebut tidak ubahnya sebagai upaya untuk mendekati jalan damai dengan Palestina, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang tabu bagi mayoritas pihak pendukungnya yang menduduki parlemen (*Knesset*). Pada 20 November 2005, Ariel Sharon mengundurkan diri dari partai Likud dan membentuk partai Kadima. Dengan partai baru ini, Ariel Sharon terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dan menyempatkan datang ke Red Sea Summit di Aqaba, Yordania, untuk berunding dengan Mahmoud Abbas yang merupakan presiden Palestina.

²⁸ Secara bahasa istilah tersebut dapat diartikan kurang lebih: Rencana Penarikan Israel secara sepihak atas tanah-tanah yang sebelumnya dikuasainya di jalur Gaza. Implementasi kebijakan tersebut dimulai pada bulan Agustus 2005 dan selesai pada September 2005.

²⁹ Agus Irawan, *Rahasia Dendam Israel-Jejak Berdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab*, Jakarta: Kinza Book, 2009.

³⁰ M. Fadhila Arif Firmansyah, *Strategi Zionisme Ortodoks Dalam Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2011, hlm. 95.

³¹ <http://www.judaism.about.com> > Hebrew & Israel > Middle East Peace Process, diakses pada 5 Juni 2011 pukul 19.23 WIB.

Masa Pemerintahan Ariel Sharon /Ehud Olmert (2005-2009)

Tahun 2005, *Knesset* Israel kembali mengadakan pemilihan umum. Pada Pemilu ini, Ariel Sharon berhasil untuk menduduki posisi perdana menteri. Hanya saja kemenangan Sharon pada 2005 berbeda dengan sebelumnya, karena pada pemilihan umum tersebut ia disokong oleh partai Kadima, yaitu partai baru hasil bentukan Ariel Sharon dan beberapa politisi lainnya yang membelot dari partai Likud. Keputusan Sharon tersebut tidak terlepas dari adanya efek kebijakan pelepasan 21 wilayah Israel di Gaza yang menimbulkan kontroversi.

Partai Kadima sendiri pada pemilihan umum tersebut berhasil memenangi sebagian besar kursi *Knesset*. Pasca “pembelotan” Sharon tersebut, politik luar negeri Israel, khususnya terhadap Palestina, mengalami penurunan agresifitas secara drastis dibandingkan pada medio pertama pemerintahannya pada 2001-2004. Fakta tersebut memperlihatkan bagaimana peralihan pemikiran seorang pemimpin negara mempengaruhi politik luar negeri negara tersebut.

Masa kepemimpinan Ariel Sharon berakhir pada bulan April 2006 ketika ia tidak lagi dapat aktif karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Pada saat itu pula Ehud Olmert langsung ditunjuk sebagai perdana menteri. Dibawah rezim Ehud Olmert, yang juga berasal dari partai Kadima, politik luar negeri Israel terhadap Palestina merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada masa tersebut, kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina terlihat fluktuatif. Ini terlihat dari kebijakan blokade jalur Gaza pada medio tahun 2007 sebagai reaksi atas penguasaan Hamas terhadap jalur Gaza, dan langsung diikuti oleh penandatanganan konferensi Annapolis³² pada November 2007. Dalam perundingan itu, Olmert berjanji untuk tidak menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpotensi menjauhkan kesepakatan damai Israel dengan Palestina. Agresifitas Israel terhadap Palestina kembali meningkat pada akhir 2008 melalui adanya invasi Gaza dalam melakukan balasan terhadap serangan-serangan roket pejuang Palestina sepanjang akhir 2008.³³

Masa Pemerintahan Benjamin Netanyahu (2009-2010)

Kepemimpinan Ehud Olmert akhirnya selesai pada awal tahun 2009. Perdana Menteri pengganti Ariel Sharon tersebut digantikan oleh Benjamin Netanyahu dari partai Likud, yang berhasil memenangi koalisi di Parlemen (*Knesset*) untuk menduduki kursi perdana menteri. Pada pemilihan umum yang terakhir diadakan – tahun 2009, sebenarnya partai Kadima berhasil menjadi pemenang dengan perolehan 28 kursi di *Knesset*, disusul oleh partai Likud dengan 27 kursi, Partai Yisrael Beiteinu dengan 15 kursi, dan kursi-kursi yang lainnya didapatkan oleh partai Buruh dengan 13 kursi, partai-partai nasionalis keagamaan dan gabungan Partai Arab-Israel. Meski secara kursi partai Kadima unggul dari partai Likud, akan tetapi dalam perebutan posisi kursi Perdana Menteri, partai Kadima harus mengakui keunggulan partai Likud, karena partai Likud berhasil membentuk pemerintahan koalisi dengan keberhasilannya merangkul partai Yisrael Beiteimu, partai buruh dan partai-partai nasionalis keagamaan.³⁴ Dengan demikian, secara otomatis Benjamin Netanyahu, yang juga pemimpin partai Likud, berhak menduduki kursi perdana menteri karena memiliki dukungan yang lebih banyak dibandingkan Tzipi Livni, calon dari partai Kadima. Ini adalah periode kedua kepemimpinan Netanyahu setelah

³² Konferensi Annapolis merupakan perundingan antara Israel dan Palestina yang membahas mengenai prospek *two state solution* dalam upaya perdamaian Israel-Palestina. delegasi dari 40 negara, termasuk, Indonesia, Malaysia, dan Turki, <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/11/21/brk,20071121-112005.id.html>, diakses pada 1 Maret 2011.

³³ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm, diakses pada 1 Maret 2011.

³⁴ <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4025458,02.html>, diakses pada 29 November 2010 pukul 19.15 WIB.

kepemimpinannya yang pertama pada tahun 1996.

Terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri secara langsung berpengaruh terhadap politik luar negeri Israel di Palestina. Peningkatan agresifitas Israel pada periode ini terindikasi melalui berbagai pernyataan Netanyahu terkait ancaman Hamas dan Penguasaan penuh atas wilayah Tepi Barat. Ini terlihat dari adanya kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur sepanjang tahun 2010.³⁵ Meskipun pada November 2009, atas desakan Amerika Serikat dan dunia internasional, Netanyahu sempat menandatangani kesepakatan moratorium penghentian pembangunan pemukiman Yahudi, akan tetapi Perdana Menteri yang naik melalui partai Likud tersebut tetap melanggar kesepakatan moratorium tersebut dengan tetap melaksanakan pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur pada awal tahun 2010.

Pada tahun yang sama, peningkatan agresifitas Israel dalam memerangi Hamas terlihat dari adanya serangkaian penyerangan terhadap pemimpin dan pejuang Hamas pada awal hingga medio tahun 2010. Kebijakan lain yang menunjukkan adanya peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina ialah penerapan politik isolasi terhadap Palestina, khususnya terhadap warga Palestina yang berada di jalur Gaza. Politik isolasi Israel yang juga disebut sebagai blokade Gaza tersebut sebenarnya telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Ehud Olmert pada Juni 2007, hanya saja pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu terdapat adanya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berupa semakin ketatnya pengawasan Israel terhadap segala bentuk barang yang masuk ke wilayah Gaza. Hal tersebut berujung pada tragedi kapal Mavi Marmara yang mengangkut relawan kemanusiaan Gaza dari seluruh dunia pada bulan April 2010. Tragedi tersebut merupakan imbas dari semakin ketatnya blokade jalur Gaza pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Memasuki akhir tahun 2010, Israel semakin meningkatkan agresifitasnya terhadap Palestina. Hal ini tercermin dari adanya penolakan Netanyahu untuk memperpanjang moratorium penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur pada September 2010. Pasca berhentinya moratorium tersebut, Israel semakin gencar melakukan aneksasi wilayah terhadap Palestina, melalui pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur yang dimulai pada Oktober 2010.

Dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya, upaya perluasan wilayah Israel terhadap Palestina mengalami peningkatan pada masa kepemimpinan Netanyahu. Hal tersebut seolah mengulang kebijakannya pada periode kepemimpinannya pada tahun 1996-1999, dimana pada saat itu Netanyahu mendukung menetapnya warga Yahudi di Hebron, sebagai upaya aneksasi terhadap Palestina. Hal yang serupa terjadi pada saat ini, dimana Netanyahu gencar melakukan pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur sepanjang 2010.

Peningkatan agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina merupakan efek langsung dari terpilihnya Benjamin Netanyahu pada pemilihan umum 2009, yang mempunyai visi untuk menghapuskan keberadaan Palestina dengan cara melakukan penumpasan terhadap para pejuang Hamas.³⁶ Beberapa fenomena tersebut memperlihatkan adanya fluktuasi agresifitas politik luar negeri Israel terhadap Palestina, baik berupa upaya-upaya aneksasi terhadap Palestina maupun legalitas tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun pejuang Palestina, dalam periode kepemimpinan Perdana Menteri di Israel sejak deklarasi berdirinya negara Palestina tahun 1988 pada pertemuan Dewan Nasional Palestina di Aljazair.

³⁵ http://eramuslim.com/read/2010/07/03/05224278/AS_Sudah_Tahu_Semua_Rencana_Israel_di_Palestina.htm, diakses pada 9 Juli 2011, pukul 22.10 WIB.

³⁶ <http://internasional.kompas.com/read/2009/02/04/11140873/Jika.Terpilih.Netanyahu.Janji.Tumpas.Hamas>, diakses pada 9 Juli 2011 pukul 23.22 WIB

Berbagai fakta diatas secara langsung menunjukkan gambaran umum politik luar negeri Israel terhadap Palestina. Sesuai dengan definisi politik luar negeri Israel menurut Naomi Chazan yang menyebut politik luar negeri Israel sebagai cerminan ideologi, persepsi, dan prioritas,³⁷ maka terlihat jelas bagaimana masing-masing rezim menjalankan politik luar negeri Israel terhadap palestina, yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan persepsi dan prioritas pada masing-masing rezim tersebut secara langsung berpengaruh terhadap fluktuasi politik luar negeri Israel terhadap Palestina. Pemaparan mengenai fluktuasi politik luar negeri Israel terhadap Palestina, seperti yang tercantum diatas, tentunya akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perubahan persepsi perdana menteri Israel berpengaruh terhadap politik luar negeri Israel terhadap Palestina.

Penutup

Dari pemaparan-pemaparan diatas, terlihat jelas bagaimana fluktuasi kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina sejak deklarasi kemerdekaan Palestina pada 1988. Dimulai pada tahun 1988, ketika kursi Perdana Menteri Israel diduduki oleh Yitzhak Shamir, politik luar negeri Israel terhadap Palestina diwarnai oleh adanya pengusulan negosiasi dengan Palestina yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Yitzhak Shamir.³⁸ Pada periode selanjutnya, Israel dibawah kepemimpinan Yitzhak Rabin menyetujui penandatanganan Perjanjian Oslo I dan II, yang berakibat pada terbunuhnya Yitzhak Rabin pada 1995.

Tahun 1996, yaitu masa kepemimpinan pertama Benjamin Netanyahu, pada awal pemerintahannya Perdana Menteri yang memenangi pemilihan umum dibawah dukungan partai Likud tersebut mengeluarkan kebijakan berupa penempatan warga Yahudi di Hebron sebagai upaya aneksasi terhadap wilayah tersebut. Menjelang akhir pemerintahannya, Netanyahu sempat menandatangani perjanjian *Wye River*. Penandatanganan perjanjian tersebut melalui proses yang cukup alot, mengingat Netanyahu sempat melakukan penolakan, sebelum didesak oleh dunia internasional. Penandatanganan perjanjian *Wye River* juga menandai adanya upaya perdamaian dengan Palestina. Kebijakan tersebut secara tidak langsung membuat Netanyahu gagal terplih kembali pada pemilihan umum yang diselenggarakan oleh parlemen (*Knesset*) pada 2001, yang berhasil dimenangkan oleh Ehud Barak.³⁹

Pada masa pemerintahan Ehud Barak, yang berasal dari partai buruh, sebenarnya terdapat harapan akan terciptanya proses perdamaian kembali dengan Palestina. Hal tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian Camp David pada tahun 2000. Hanya saja tindak lanjut dari perjanjian tersebut tidak menemui titik terang. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktiadaan kesepakatan antara Ehud Barak dan Yasser Arafat sebagai pemimpin Palestina.⁴⁰

Ehud Barak selanjutnya digantikan oleh Ariel Sharon pada 2001. Pada masa awal kepemimpinannya, Ariel Sharon mengeluarkan kebijakan berupa instruksi untuk melakukan penyerangan terhadap warga sipil Palestina. Akan tetapi pada tahun 2004, Perdana Menteri yang naik dengan sokongan partai Likud tersebut mengeluarkan kebijakan berupa penyerahan 21 wilayah Israel di Gaza terhadap Palestina.⁴¹ Kebijakan tersebut sekali lagi menandai adanya upaya perdamaian dengan Palestina oleh Israel dan sekaligus menandai akhir dari kebersamaan Ariel Sharon dengan Partai Likud, dimana

³⁷ Naomi Chazan, Judith Kipper, and Harold H. Saunders (terj.), *The Middle East in Global Perspective*, Colorado: United State of America by Westview Press, 1991, hlm. 104

³⁸ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah...*

³⁹ Musthafa Abd. Rahman, *Dilema Israel...*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 177.

⁴¹ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm , diakses pada 1 Maret 2011

Sharon kemudian mendirikan partai baru bernama parta Kadima.

Bersama partai Kadima, Ariel Sharon berhasil menduduki kembali posisi Perdana Menteri pada pemilihan umum yang diselenggarakan oleh parlemen (*Knesset*) pada tahun 2005. Hanya saja, Sharon tidak sempat menyelesaikan masa jabatannya, hingga pada tahun 2006 ia digantikan oleh Ehud Olmert. Masa kepemimpinan Ehud Olmert diwarnai oleh penyerangan terhadap jalur Gaza pada akhir 2008. Tahun 2009, parlemen Israel kembali mengadakan pemilihan umum yang berhasil menempatkan kembali Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Dibawah rezim Netanyahu, kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina menjadi semakin agresif. Hal tersebut terlihat dari berlangsungnya pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur yang menandai keinginan Israel untuk melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abd. Rahman, Musthafa. 2002. *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Kompas
- Eby Hara, Abubakar. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa
- Irawan, Agus. 2009. *Rahasia Dendam Israel-Jejak Berdarah Israel di Palestina dan Dunia Arab*. Jakarta: Kinza Book.
- Kencana, Inu. 2005. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Bandung:Refika Aditama.
- Kipper, Judith, and Saunders , Harold (ed.). 1991. *The Middle East in Global Perspective*, Colorado: United State of America by Westview Press
- Kuncahyono , Trias, 2008, *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Mas'oeed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- , 1991. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisi*. Jakarta: LP3ES
- Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Mizan

Skripsi:

- Firmansyah, M. Fadhila Arif. 2011. *Strategi Zionisme Ortodoks Dalam Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

Internet:

- Jayadiputra, Dedi. *Politik luar negeri PM. Benjamin Netanyahu terhadap perjanjian Wye River (1996 -1999)*. Kumpulan tesis Universitas Indonesia. Jakarta, dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=92736&lokasi=lokal>, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 14.56 WIB.
- Paramitha, Gracia. 2011. "Seluk Beluk Politik Luar Negeri", dalam <http://theamazinggrace.web.id/test-seluk-beluk-politik-luar-negeri-p13.html>, diakses pada 2> Maret 2011
- [http://eramuslim.com/read/2010/07/03/05224278/AS Sudah Tahu Semua Rencana Israel di Palestina.htm](http://eramuslim.com/read/2010/07/03/05224278/AS_Sudah_Tahu_Semua_Rencana_Israel_di_Palestina.htm), diakses pada 9 Juli 2011, pukul 22.10 WIB
- <http://internasional.kompas.com/read/2009/02/04/11140873/Jika.Terpilih.Netanyahu.Janji.Tumpas.Hamas>, diakses pada 9 Juli 2011 pukul 23.22 WIB
- <http://www.tempo.co/hg/timteng/2010/06/01/brk,20100601-251719,id.html>, diakses pada 14 September 2011, pukul 17.04 WIB.

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4025458,02.html>, diakses pada 29 November 2010 pukul 19.15 WIB.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4135680.stm, diakses pada 1 Maret 2011

<http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/11/21/brk,20071121-112005.id.html>, diakses pada 1 Maret 2011

<http://www.judaism.about.com> › Hebrew & Israel › Middle East Peace Process, diakses pada 5 Juni 2011 pukul 19.23 WIB

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://sahabatalaqsha.com/nws/wpcontent/uploads/2010/05/Tanah-Palestina-yang-dicaplok-Israel-dari-tahun-ke-tahun.-Warna-hijau-menunjukkan_wilayahPalestina.-buchanan.org, diakses pada 8 Mei 2011, pukul 19.39 WIB.